

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA FS SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN ATAS TINDAKAN PEMINJAMAN PERUSAHAAN REKANAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama : Nidya Indah Kusuma Putri

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung di Negara Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa angka korupsi di Indonesia semakin berkembang, baik dilihat disisi pelaku yang dari berbagai kalangan dan juga dari modusnya. Korupsi memiliki dimensi yang luas, terlihat bahwa korupsi sangat berkaitan dengan kebijakan dan perilaku penyelenggara pemerintahan. FS yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues Aceh tahun 2013 dan FS sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan dan penanaman bibit tanaman pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues Aceh tahun anggaran 2013. Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya sebagai Pengguna Anggaran dengan mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui peminjaman perusahaan rekanan yaitu CV.FP dan CV.TL kemudian memberikan uang sewa atau *fee* 2% dari nilai kontrak. FS selaku Pengguna Anggaran juga menetapkan metode pelaksanaan pengadaan dengan metode Pengadaan Langsung (PL) dan FS menyusun serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). FS merekomendasikan kepada Pejabat Pengadaan untuk memilih dan menetapkan penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan paket pekerjaan pengadaan tersebut. Tindakan FS ikut serta dalam mengikuti kegiatan pengadaan dan penanaman bibit tanaman pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2013 telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Pengguna Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**CRIMINAL RESPONSIBILITIES OF FS AS A BUDGET USER FOR
COMPANY LOANS PARTICIPANTS IN PROCUREMENT OF
GOODS AND SERVICES REVIEWED FROM LAW NUMBER 20
YEAR 2001 REGARDING AMENDMENT TO LAW NUMBER 31
YEAR 1999 CONCERNING ERADICATION OF
CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION**

Name : Nidya Indah Kusuma Putri

Dicipline/Study Programme : Hukum/Ilmu Hukum

Contributor : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRACT

Law enforcement within the scope of reform that has taken place in the State of Indonesia is closely related to the eradication of criminal acts of corruption. Given that the number of corruption in Indonesia is growing, it is well seen by the perpetrators from various circles and also from the mode. Corruption has a broad dimension, it appears that corruption is closely related to the policies and behavior of government administrators. FS who is a Civil Servant as Head of the 2013 Gayo Lues Regency Environmental Office and FS as a Budget User in the procurement and planting of plant seeds at the Gayo Lues Regency Environment Office in Aceh in the 2013 fiscal year. He allegedly committed corruption by abusing the authority he has as a Budget User by participating in the procurement of goods and services through the lending of partner companies namely CV.FP and CV.TL then provided rent or fees of 2% of the contract value. FS as a Budget User also sets out the method of implementing procurement with the Direct Procurement method and FS arranges and sets the Self Estimated Price. FS suggested the Procurement Officer to select and determine the suppliers of goods and services in carrying out the procurement work package. FS' action in participating in the procurement and planting of plant seeds in the Office of Environment of Gayo Lues Regency in the 2013 budget year fulfilled the elements in Article 12 letter i of Law Number 20 Year 2001 Regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 Concerning Eradication of Criminal Action of Corruption.

Keywords : Budget User, Procement of Goods and Services, Law Number 20 Year 2001 Regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 Concerning Eradication of Criminal Action of Corruption